

IMPLEMENTASI DIGITAL GOVERNMENT SERVICES PADA BIDANG PENDIDIKAN DI PEMERINTAH PROVINSI DIY

Sri Wahyuni
Bagus Indarwanto

ABSTRACT

The study was focused on the implementation of Digital Government Services in education in DIY Province, especially how far the implementation of the program goes, how effective the program can solve the gap of quality in education, and what kinds of constraints were faced in the process of the program implementation. The implementation process was explained with several aspects : e-leadership, human resources, infrastructure, business environment, and Learning gateway portal development.

The result of the study showed that the e-leadership was not owned yet by all leaders at all level. From the aspect of infrastructure development, it can be seen that the capacity of the Government of DIY Province is still relatively low. The allocation of budget from APBD of DIY Province was not comprehensive and sustainable yet, causing a problem in providing the infrastructure of computer laboratories for schools in DIY Province. The human resources development was not yet adequate because the result of the trainings couldn't fullfill the competency needed for managing the DIY Learning Gateway service. The growth of internet cafes need a regulation that protects the internet user (especially the pupils) from the negative material such as pornography. The constraints faced in the implementation of the program were : it was difficult to coordinate crossed-functionally, the competency of the teachers was relatively low, the infrastructure and the budget were inadequate, and the lisences for the Internet Service Providers in Indonesia were very various.

Starting from the result of the study, it is recommended that it is necessary to develop a stronger e-leadsrhip not only for the local leaders but also for the schools that provide the virtual school service, to provide an accurate data about the schools that need computer laboatories, to give more applicable training for teachers, and to provide the internet at schools as soon as possible through various programs such as Komputer Murah, Laptop Murah and so on.

Keywords : Digital Government Services, e-leadership, human resources, infrastructure, business environment, DIY Learning Gateway.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan di masa mendatang, sektor teknologi informasi dan komunikasi merupakan sektor yang dominan. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Peran yang diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah memberikan informasi baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk kepentingan profesi.

Pemerintahan di hampir seluruh dunia kini sedang menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat secara lebih efektif. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau yang dikenal dengan istilah *e-government*. Pemerintah tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* mulai ditinggalkan dan transformasi *traditional government* menjadi *electronic government* (*e-government*) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini.

Di Indonesia, inisiatif untuk mengembangkan *e-government* telah dimulai sejak tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia, yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Administrasi publik merupakan salah satu area di mana pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan dasar dan mensimplifikasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk mengimplementasikan *e-government* dalam upaya memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Melalui pengembangan *e-government* dapat dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

E-government merupakan suatu konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas, dengan memanfaatkan teknologi telematika, khususnya internet. Masyarakat luas bisa memonitor dan

memberikan masukan secara *real-time*, tentang apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan serta kritik dan saran yang akan langsung diterima oleh pemerintah. Berbagai potensi layanan dan strategi implementasi *e-government* dapat diaplikasikan guna mendukung otonomi daerah, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien dan transparan.

Demikian pula dengan Pemerintah DIY yang sejak tahun 2000 telah melakukan reformasi di berbagai bidang, antara lain reformasi kelembagaan yang berupa restrukturisasi organisasi, reformasi finansial, reformasi Sumber Daya Manusia, reformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta reformasi nilai dan budaya kerja. Sebagai bagian dari pelaksanaan berbagai reformasi tersebut, Pemerintah Provinsi DIY berupaya seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*).

Pengembangan teknologi informasi di dalam lingkungan pemerintah DIY telah dimulai sejak tahun 2002 dengan dibangunnya situs www.pemdadiy.go.id dan diikuti dengan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* dan pembangunan infrastruktur interkoneksi antar instansi Pemerintah Provinsi DIY dan pengembangan perangkat lunak (*software*). Selama kurun waktu 2003 sampai dengan 2006 Pemerintah Provinsi DIY telah mendapatkan penghargaan *E-Government Award* dari Majalah Warta Ekonomi, untuk kategori Pemerintah Provinsi, bahkan pada tahun 2006 selain meraih predikat sebagai Terbaik Pertama untuk Kategori Pemerintah Provinsi, DIY juga menyabet penghargaan *Best of The Best*. Langkah dan prestasi yang telah dicapai Pemerintah Provinsi DIY dalam mengimplementasikan *e-government* menunjukkan keseriusan para pimpinan di Pemerintah Provinsi DIY untuk benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Mengingat kegiatan pengembangan *e-government* demikian banyaknya dan tidak akan selesai dalam jangka waktu pendek, serta dalam rangka memenangkan persaingan baik antar pemerintah daerah maupun antara wilayah, maka mulai tahun anggaran 2005 Pemerintah Provinsi DIY mulai memutuskan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hingga kemudian lahirlah program *Digital Government Services* (DGS). Pengembangan program DGS diyakini akan mempercepat tercapainya visi Pemerintah Provinsi DIY yaitu "Mantapnya Pemerintah Daerah yang katalistik dan mendukung masyarakat kompetitif" karena diyakini dengan pengembangan DGS dapat mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh

masyarakat serta merupakan bagian upaya mewujudkan *Jogja Cyber Province*.¹

Penggunaan terminologi *Digital Government Services* (DGS) dimaksudkan untuk menunjukkan dengan jelas sikap dan tujuan Pemerintah Provinsi DIY dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan. Dalam konsep DGS, titik beratnya terletak pada kata 'services' (pelayanan) sedangkan komponen teknologi informasi dan komunikasi (*digital*) diposisikan sebagai komponen pendukung (*supporting dan enabler*). Dalam konsep DGS, pelayanan prima kepada masyarakat hanya akan terwujud jika ada keselarasan antara aspirasi, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat dengan proses kerja pemerintah yang didukung oleh layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bersifat operasional (misalnya sistem operasi perijinan) dan pendukung (sistem informasi kepegawaian, infrastruktur) yang diakselerasi oleh layanan strategis.

PROGRAM DIGITAL GOVERNMENT SERVICES DI PEMERINTAH PROVINSI DIY

Reformasi yang bergulir sejak tujuh tahun lalu membawa konsekuensi adanya tuntutan terhadap semua pihak untuk melakukan perubahan demi memulihkan kepercayaan warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan di negeri ini. Dalam tulisannya yang dimuat dalam buku Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (*Integrated Civil Service Reform/ICSR*) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Provinsi DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa reformasi birokrasi melalui transformasi berarti mendesain ulang arsitektur organisasi secara menyeluruh melalui empat dimensi, yaitu: *reframing, restructuring, revitalizing* dan *renewal*. *Reframing* mengacu pada perubahan pada *organizational mindset*, *restructuring* mengacu pada perubahan *body* organisasi dan kemampuan berkompetisi, *revitalizing* pada kemampuan menghubungkan organisasi dengan lingkungannya, dan *renewal* pada perubahan semangat organisasi.

Menurut Sri Sultan, dalam reformasi birokrasi yang terpenting adalah perubahan pola pikir dan mentalitas baru di tubuh birokrasi sendiri. Karena sebaik apa pun konsep, jika semangat dan mentalitas penyelenggara pemerintahan masih menggunakan paradigma lama, konsep tersebut hanya akan menjadi slogan kosong tanpa membawa perubahan apa pun.

Jogja Cyber Province sebagai bentuk implementasi *Electronic Government* (e-

¹ Menurut Blueprint Jogja Cyber Province, 2005, Jogja Cyber Province diartikan sebagai model Provinsi yang melakukan transformasi layanan yang berorientasi kepada pelanggan (masyarakat) dengan berbasis proses bisnis, informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerasi pembangunan wilayah Provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien dan efektif.

Government) adalah inisiatif yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DIY guna mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya. Pemerintah DIY menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya semata tidaklah menjamin keberhasilan pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemanfaatan TI dilaksanakan baik dengan orientasi ke dalam (*inward*) maupun keluar (*outward*). Pemanfaatan TI dengan orientasi *inward* dilaksanakan dengan membangun jaringan komunikasi data, sistem informasi, *website* instansi Pemerintah Daerah, dan sebagainya. Sedangkan pemanfaatan TI dengan orientasi *outward* (ke masyarakat) diwujudkan dengan program DGS untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan program DGS adalah langkah awal untuk menuju *Jogja Cyber Province* sebagai inisiatif yang dikembangkan guna pemanfaatan teknologi informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan lainnya. Sehingga diharapkan dapat mengakselerasi upaya peningkatan taraf hidup dan daya saing dalam rangka mewujudkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pertumbuhan Jawa bagian Selatan maupun *Economic Hub* bagi Provinsi lain di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Provinsi DIY perlu menyusun *Jogja Cyber Province Blueprint* sebagai panduan pengembangan layanan strategis tersebut, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 42 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006.

Dalam mengimplementasikan *e-government* dalam bentuk *Digital Government Services* di Provinsi DIY digunakan kebijakan sebagai berikut : (1) Memposisikan masyarakat sebagai pelanggan (*customer*); (2) Mengenal pelanggan dengan baik dan memberikan layanan berbasis pengetahuan yang sesuai dengan budaya pelanggan (*Know Your Customers*); (3) Inovasi dalam mengembangkan produk dan layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan dan untuk mengantisipasi potensi masalah selanjutnya; (4) Inovasi untuk memperbaiki dan mengubah proses kerja agar dapat terus menerus meningkatkan kepuasan pelanggan; (5) Memperbaiki dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya dan organisasi penyedia layanan; (6) Mendekatkan produk dan layanan kepada masyarakat; dan (7) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, bukan kepentingan pemerintah.

Banyak sekali inovasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan jenis layanan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Inovasi-inovasi inilah yang menjadi landasan perubahan atau transformasi layanan bagi masyarakat. Beberapa inovasi yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dan diperkirakan menjadi akselerator

pencapaian tujuan. Untuk itu dipilih 6 (enam) bidang unggulan yang meliputi : (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi; (3) Bidang Pariwisata; (4) Bidang Pertanian; (5) Bidang Perikanan dan Kelautan; (6) Bidang Perhubungan.

Pengembangan *Jogja Cyber Province* dipicu oleh berkembangnya aspirasi masyarakat. Selain itu masyarakat juga perlu berinteraksi dengan pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kemampuan ekonomi. Juga mampu menjangkau peluang pengembangan potensi dan pemberdayaan secara lebih luas serta kepastian hukum.

BIDANG-BIDANG UNGGULAN LAYANAN DGS

Program transformasi layanan ini merupakan kelanjutan dari Program Transformasi Birokrasi yang telah dicanangkan sebelumnya. Pengembangan layanan strategis ini direncanakan, dikembangkan dan dikelola dengan proses dan metode inovatif guna menjamin kesinambungan dan kualitas layanan yang diberikan. Mengingat bidang unggulan yang harus dikerjakan demikian banyak apabila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang tersedia di Pemerintah Provinsi DIY, maka perlu disusun *roadmap* kegiatan DGS tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang disesuaikan dengan tingkat prioritas pengembangan dari masing-masing bidang unggulan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk mencapai misi pemerintah daerah dan mewujudkan masyarakat yang berdaya saing bukannya tanpa halangan. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang ada, maka DGS dikembangkan dengan mengacu pada kerangka kerja (*framework*). Adapun dalam *framework* tersebut, DGS mensyaratkan adanya landasan kerja yang baik dan kokoh, yang meliputi sasaran dan komitmen, pembiayaan, kompetensi sumberdaya dan fungsi organisasi yang sinergi, orkestrasi proses kerja prima, kebijakan, perundangan, standar dan pengukuran, serta ketersediaan data primer.

BEST PRACTICE IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI PROVINSI DIY

Pentingnya *website* untuk menyediakan data dan informasi yang valid dan akurat sangat dirasakan manfaatnya pada saat terjadi bencana gempa bumi pada bulan Mei 2006 yang lalu. Untuk memberikan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, Pemerintah Provinsi DIY membangun *media center on-line* (www.jogja.mediacenter.or.id) yang merupakan terobosan baru dalam menangani bencana alam. Informasi yang disajikan dalam portal ini sangat lengkap, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai saluran informasi oleh pemerintah kabupaten yang ada di lingkungan provinsi DIY dalam menangani bencana.

Satuan Pelaksana (Satlak) Kabupaten Bantul memanfaatkan website www.bantul.go.id dan *media center* milik Pemerintah Provinsi DIY untuk memberikan data dan informasi mengenai jumlah korban, sumber bantuan, dan distribusi uang lauk pauk (*living cost*), sehingga semua bantuan dana dan penyalurannya dapat diinformasikan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Selain itu Pemkab Bantul juga menampilkan master plan pembangunan ulang daerah Bantul di *website* tersebut, sehingga masyarakat mengetahui program-program apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Bantul sehubungan dengan pembangunan kembali Kabupaten Bantul pasca gempa.

Demikian pula yang dilakukan oleh Pemkab Sleman dalam menangani bencana Gunung Merapi. Untuk menyediakan informasi bagi masyarakat, Pemkab Sleman memanfaatkan *website* Pemkab Sleman www.sleman.go.id sebagai pusat informasi bencana dengan memberikan informasi mengenai perkembangan terakhir kondisi Merapi. Pemanfaatan TI dalam penanggulangan bencana juga dilakukan dengan menyediakan perangkat komputer di setiap posko Satlak, sehingga semua proses pencatatan data dilakukan dengan komputerisasi yang didukung dengan penyediaan anggaran untuk pulsa ponsel bagi semua anggota Satlak untuk memudahkan koordinasi.

Walaupun informasi yang disajikan melalui *website* ini kurang memberikan dampak yang bombastis kepada masyarakat karena kendala SDM yang sangat terbatas. Sehingga tidak setiap saat dapat melakukan *up-date* informasi seperti halnya media elektronik, namun informasi yang ada di *website* tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kondisi Gunung Merapi.

Manfaat yang juga penting dari implementasi *e-government* adalah untuk memasarkan wilayah. Persaingan antar wilayah yang makin ketat menuntut pemerintah daerah untuk lebih cerdas dalam mempromosikan daerahnya agar dapat memenangkan persaingan global. Pemerintah Provinsi DIY telah memanfaatkan *e-government* dalam pemasaran wilayah dalam tingkatan informasi satu arah dari *producer* kepada *customer*, dengan orientasi pengembangan ekonomi. Proses pengolahan informasi dilakukan secara *off-line* dalam lingkup *back-office* dan *on-line* pada *front-office* dengan menggunakan media internet sebagai portal informasi. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DIY berperan sebagai katalisator untuk mempercepat proses pembangunan dengan melakukan promosi *brand* kepada konsumen.

Informasi yang terdapat dalam situs pemasaran wilayah dapat dikategorikan ke dalam : (1) *Brand Visualization* Informasi yang disajikan tidak secara langsung menampilkan *brand* 'Jogja Never Ending Asia' baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. (2) *Information Changes* Tingkat perubahan informasi yang disajikan

dalam situs dapat dibedakan dengan statis yaitu tidak mengalami perubahan dalam waktu yang lama, dan dinamis yang mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. (3) Jenis Informasi yang muncul dalam situs internet dikategorikan sebagai informasi umum, pariwisata, event budaya, potensi dan peluang, sarana dan fasilitas pendukung, serta berita. (4) Jenis data yang digunakan dapat berupa teks maupun gambar dan peta. (5) Kelemahannya adalah komunikasi yang bersifat langsung (online) dan bahasa.

Sebagai portal yang memberikan informasi tentang pariwisata, situs www.tasteofjogja.go.id menyediakan informasi yang lengkap mengenai pariwisata di DIY, termasuk fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata. Selain itu juga terdapat 4 (empat) pilihan bahasa yang dapat digunakan oleh pengunjung dalam mengakses situs tersebut, yaitu Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang dan Prancis. Adanya empat pilihan bahasa ini dimaksudkan agar situs ini dapat diakses secara global oleh seluruh penduduk dunia, sehingga dapat lebih memperkenalkan DIY di arena internasional.

Dua jenis pemanfaatan website di atas memang masih memiliki beberapa kelemahan. Namun demikian *best practice* pemanfaatan website untuk memasok data dan informasi dan pemanfaatan website untuk pemasaran wilayah seperti yang dipaparkan di atas dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya yang ingin mengoptimalkan pemanfaatan *e-government* bagi pembangunan di wilayahnya.

Pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. UUD 1945 pun mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN maupun APBD. Namun kenyataannya, hingga saat ini pendidikan dasar dan menengah di negara kita masih memiliki sejumlah kelemahan. Salah satu aspek kelemahan pendidikan itu adalah dalam sistem pembelajaran.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi DIY mengembangkan program untuk para guru dan siswa pada tingkat pendidikan dasar dan menengah berupa layanan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga para siswa dan guru serta masyarakat umum dapat melakukan kegiatan pembelajaran tanpa batas ruang dan waktu.

Tujuan program *Digital Government Services* pada bidang pendidikan di Provinsi DIY adalah untuk mengatasi permasalahan umum pada bidang pendidikan yang dihadapi oleh Provinsi DIY, antara lain belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi; belum optimalnya kemampuan akademik dan profesionalisme tenaga kependidikan; kurangnya jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan; belum mantapnya sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum; belum optimalnya pemberdayaan lembaga

pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah; belum mantapnya penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen; belum optimalnya kualitas lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah; belum terselenggaranya secara memadai pengembangan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh; serta belum optimalnya keterpaduan program pembangunan bidang pendidikan dengan bidang lain.

DIY LEARNING GATEWAY SEBAGAI LAYANAN UNGGULAN DGS PADA BIDANG PENDIDIKAN

Inisiatif *Smart School* dipertajam menjadi inisiatif *Learning Gateway* (Gerbang Pembelajaran), sedangkan inisiatif *Regional Digital Library Network* (Jaringan Perpustakaan Digital) dipisahkan menjadi inisiatif tersendiri. Namun demikian, inisiatif *Regional Digital Library Network* tetap menjadi bagian dari program peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi DIY.

Layanan ini menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pengajar, pelajar, orang tua, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), serta masyarakat. Fasilitas yang tersedia antara lain fasilitas komunikasi dan kolaborasi, bank soal dan ujian, publikasi dan informasi, kurikulum dan pelajaran, manajemen sumber daya, administrasi, dan pengembangan profesi yang semuanya dihubungkan dengan jaringan perpustakaan digital dan sumber-sumber belajar internasional. Layanan ini bisa diakses dari berbagai tempat, yang memiliki fasilitas internet.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 42 tentang *Jogja Cyber Province Blueprint*, sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi DIY melalui layanan *DIY Learning Gateway*, pertama adalah memberikan kesempatan kepada pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk terus belajar di luar jam sekolah dengan memanfaatkan beragam media akses seperti Internet (Warnet, Warnet Keliling), Telepon dan SMS. Kedua, sebagai media pertukaran dan berbagi materi pembelajaran bagi sekolah dan lembaga pendidikan. Ketiga, menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan bagi sekolah dan lembaga pendidikan di daerah. Keempat, gerbang Pembelajaran sebagai sekolah maya (*virtual school*) yang melibatkan interaksi aktif orang tua, siswa dan guru. Dan kelima, mengembangkan potensi komunitas Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) secara umum dan guru mata pelajaran pada khususnya.

Layanan *DIY Learning Gateway* ditujukan untuk para pelajar dan masyarakat umum, namun ada kelompok utama yang menjadi prioritas dari program ini, yaitu pelajar SD dan SMP, yang dianggap masih belum melek TI. Sedangkan siswa SMA dianggap sudah melek TI (mereka termasuk dalam angka 16% pengguna

internet). Layanan ini dalam implementasinya melibatkan peran guru dalam porsi yang besar yaitu sebagai pengisi *contents* pembelajaran pada portal pembelajaran www.jogjabelajar.org. Para guru yang memiliki kompetensi di bidang TI dapat mendaftarkan diri untuk menjadi pengajar pada portal *DIY Learning Gateway*.

IMPLEMENTASI PROGRAM DGS PADA BIDANG PENDIDIKAN

1. Pengembangan *E-Leadership*

Aspek *e-leadership* berkaitan dengan prioritas dan inisiatif Pemerintah Provinsi DIY dalam mengantisipasi dan memanfaatkan TI bagi peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan implementasi program DGS pada bidang pendidikan, pengembangan *e-leadership* mencakup upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun sikap dan dukungan dari para pejabat dalam melaksanakan inisiatif yang telah direncanakan dalam *blueprint* DGS, termasuk dukungan anggaran.

Sehubungan dengan pengembangan *e-leadership* ini kegiatan yang dilakukan antara lain dengan mengadakan pelatihan bagi para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY. Pelatihan ini dimaksudkan agar para pejabat memiliki visi atau pandangan dan sikap yang sama dalam mendukung program DGS pada bidang pendidikan.

Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada para perencana di Bapeda DIY agar para perencana memiliki wawasan dan pengertian yang sama mengenai program DGS. Di dalam program DGS bukan berarti hanya bagian Data dan TI saja yang terlibat, namun semua komponen dari institusi pemberi layanan itu harus terlibat. Program DGS menekankan pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik dari sisi pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi DIY menyadari bahwa pemanfaatan TI dalam kegiatan pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan publik dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, kecepatan, kelancaran bagi masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Tingginya komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam memanfaatkan TI dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai, antara lain penghargaan *E-Government Award* versi Majalah Warta Ekonomi. Warta Ekonomi *e-Government Award* merupakan pemberian penghargaan kepada lembaga-lembaga pemerintah terbaik dalam mengimplementasikan tatacara pemerintahan secara elektronik.

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah proses perubahan, kepemimpinan, strategi investasi *e-government*, kerja sama lembaga dengan pihak lain, dan fokus pada pelayanan masyarakat.

Selain pemberian penghargaan sesuai masing-masing kategori, juga diberikan penghargaan khusus, yaitu *Best of The Best* dan *Special Achievement*. Penghargaan *Best of The Best* diberikan kepada lembaga pemerintah yang memperoleh skor tertinggi untuk seluruh kategori, sedangkan penghargaan *Special Achievement* diberikan kepada lembaga yang berhasil melakukan koordinasi dan merangsang lembaga-lembaga pemerintah di bawahnya untuk menerapkan *e-government*.

Namun sayangnya penghargaan demi penghargaan yang telah diraih diraih oleh Pemerintah Provinsi DIY maupun pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi DIY dalam mengimplementasikan *e-government* tersebut belum dapat dijadikan indikator yang valid untuk mengukur *e-leadership* dari para pimpinan eksekutif maupun legislatif di lingkungan Pemerintah Daerah, apalagi untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan transparansi serta akuntabilitas layanan dari pemerintah daerah yang bersangkutan, karena sistem penilaian yang digunakan dalam pemberian *e-Government Award* hanya melibatkan pihak pemerintah daerah sebagai pemilik *website* dan tidak melibatkan masyarakat sebagai pengguna *website*.

Selain itu juga prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi DIY tersebut belum diikuti dengan dukungan yang memadai dari masyarakat karena sampai saat ini belum ada perubahan pandangan dari masyarakat tentang pelayanan publik atau pelayanan pemerintah yang sulit, ruwet, dan berbelit-belit. Masyarakat masih beranggapan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintah sehari-hari belum dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Provinsi DIY untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya implementasi *e-government*, maka pelayanan publik akan jauh lebih mudah, murah, transparan, lancar dan sederhana.

Salah satu indikator untuk mengukur *e-leadership* adalah komitmen pimpinan yang berupa alokasi anggaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mengimplementasikan program DGS pada bidang pendidikan. Alokasi anggaran yang kurang memadai untuk DGS bidang pendidikan dalam APBD DIY tahun 2006, bukanlah mengindikasikan masih rendahnya *e-leadership* yang dimiliki oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY, akan tetapi karena memang kemampuan APBD DIY yang kecil. Adanya sponsor dari pihak swasta juga dimungkinkan, namun pihak Pemerintah Provinsi DIY belum menentukan aturan tentang sponsorship, sehingga untuk implementasi DGS bidang pendidikan, sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui APBD dan APBN.

2. Pengembangan SDM

Disamping pelatihan dan sosialisasi terhadap para pejabat dalam rangka membangun *e-leadership*, pemerintah Provinsi DIY juga melaksanakan pengembangan SDM terhadap para guru yang memang menjadi kelompok sasaran dari program DGS pada bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya akan mengubah karakter dalam belajar, tapi juga menuntut penguasaan kompetensi-kompetensi baru yang harus dikuasai oleh siswa maupun guru.

Siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga kemampuan berfikir kritis, memiliki kreativitas, kemampuan berkolaborasi, dan menggunakan fasilitas percakapan internet. Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan tidak bisa menggantikan peran guru, karena kemampuan pedagogis dan psikologi tidak dapat digantikan oleh media apa pun.

Pemerintah Provinsi DIY melaksanakan pengembangan SDM guru dan tenaga administrasi sekolah dengan menyelenggarakan pelatihan. Para guru, tenaga administrasi sekolah dan para guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) nantinya akan menjadi pengelola layanan dan mengisi materi pembelajaran dalam portal *DIY Learning Gateway*.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menyikapi kemajuan teknologi informasi bagi tenaga kependidikan, agar mengenal dan trampil mengoperasikan komputer serta mampu membuat aplikasi program komputer dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi guna menunjang profesionalisme pembelajaran dan administrasi pelayanan sekolah. Pelatihan ini didukung oleh tenaga pengajar yang sangat aktif dalam memberikan materi pembelajaran dan mendorong semangat para peserta pelatihan agar dapat maksimal dalam menguasai materi yang diberikan.

Belum semua sekolah mengetahui tentang layanan *DIY Learning Gateway* ini. Sosialisasi merupakan salah satu hal penting yang harus dilaksanakan agar masyarakat mengetahui tentang layanan yang disediakan oleh pemerintah dan prosedur untuk menggunakan layanan tersebut. Terlebih bagi para guru dan siswa yang akan memanfaatkan layanan itu, dimana untuk memanfaatkan layanan itu, mereka dituntut harus melek TI.

Sosialisasi harus dilakukan kepada seluruh sekolah yang ada di DIY tanpa kecuali, terutama kepada sekolah-sekolah di pelosok yang seringkali materi ajar atau kurikulum di sekolah tersebut tertinggal dari sekolah-sekolah di kota. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara berkesinambungan agar semua guru dan siswa sekolah di seluruh wilayah DIY mengetahui adanya layanan DGS ini dan dapat memanfaatkannya secara optimal.

Di DIY sudah ada beberapa sekolah yang sukses menerapkan TI dalam kegiatan belajar mengajar, antara lain SMA 1 Sewon, Bantul yang dapat dijadikan contoh *best practice* yang dapat ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara luas dalam proses belajar mengajar, mulai dari menyimpan bahan ajar, menghitung hasil eksperimen, membuat presentasi yang dilengkapi dengan simulasi, grafik, gambar dan animasi interaktif untuk menjelaskan materi ajar sampai dengan mencari bahan-bahan atau referensi melalui internet. Presentasi yang dilengkapi dengan gambar animasi membuat siswa akan lebih mudah mengerti dan memahami pelajaran.

Siswa dan guru dapat juga memanfaatkan fasilitas internet yang dimiliki sekolah untuk mencari referensi atau informasi yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu. Untuk mempertahankan kesinambungan pemanfaatan TI dalam kegiatan belajar mengajar, sekolah dapat mengalokasikan sebagian dari anggaran sekolah tiap tahun untuk membiayai kebutuhan TI sekolah. Sebagai dampaknya, walaupun bersifat tidak langsung seperti yang terjadi di SMA 1 Sewon, sejak pemanfaatan komputer dan internet diterapkan di sekolah ini, prestasi para siswanya terus meningkat.

3. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur untuk mendukung implementasi DGS bidang pendidikan dilakukan dengan membangun pusat data (*data center*), pengadaan dan pengembangan *software* aplikasi pembelajaran, serta pengadaan laboratorium komputer bagi sekolah SD dan SMP yang belum memiliki laboratorium komputer. Badan Informasi Daerah (BID) sebagai lembaga yang mengelola TI di lingkungan pemerintah DIY bertugas untuk menyediakan dan membangun pusat data, walaupun anggaran yang digunakan untuk membangun pusat data tersebut berasal dari anggaran Dinas Pendidikan. Pusat data ditempatkan secara terpusat di BID karena sesuai dengan prinsip pengembangan layanan TI yang selalu mengupayakan integrasi sistem dan data, serta sesuai dengan prinsip infrastruktur yang dikelola secara terpusat dan semaksimal mungkin digunakan bersama.

Selain aspek *IT literacy* yang harus dimiliki oleh para guru dan siswa, ketersediaan alat akses yang dimiliki siswa juga menjadi salah satu aspek penting yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan akan media akses bagi para siswa maka dibutuhkan alat berupa komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa alokasi anggaran untuk membiayai program DGS pada bidang pendidikan kurang memadai dibandingkan dengan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama untuk pengadaan infrastruktur *hardware*. Untuk memenuhi kebutuhan laboratorium sekolah, Gubernur DIY telah mengajukan proposal kepada Depkominfo dan mendapat respon positif serta

dukungan penuh dari Depkominfo melalui Program Satu Sekolah Satu Komputer atau OSOL+ (*One School One Computer Laboratory+*) yang rencananya akan direalisasikan pada tahun 2008, dengan memberikan bantuan berupa laboratorium komputer kepada 500 (lima ratus) sekolah SD dan SMP di seluruh DIY. Program ini merupakan sebagian upaya untuk mengurangi kondisi kesenjangan digital di Provinsi DIY.

Selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, dalam rangka pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Pemerintah Provinsi DIY sejak tahun 2003 juga telah merencanakan untuk membangun jaringan telepon nirkabel untuk di wilayah DIY dan sekitarnya, terutama untuk daerah-daerah pelosok yang belum dijangkau oleh jaringan telepon kabel, dengan sistem CDMA (*Code Division Multiple Access*).

Pemerintah Provinsi DIY juga menyelenggarakan program Komputer Murah melalui berbagai pameran. Melalui program komputer murah ini, komputer akan menjadi lebih memasyarakat dan hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan digital di dalam masyarakat. Selain program Komputer Murah, ada juga program laptop murah yang khusus dibuat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Laptop ini juga dilengkapi dengan kartu koneksi nirkabel untuk terhubung ke jaringan internet.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan maupun asosiasi yang bergerak dalam bidang industri TI, baik skala nasional maupun internasional sangat *concern* dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan sebagai bagian dari *Social Corporate Responsibility*. Sehubungan dengan pelaksanaan program DGS, Pemerintah Provinsi DIY dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan dukungan yang maksimal pada bidang pendidikan. Jika hal itu dapat dilakukan, maka pemenuhan kebutuhan akan perangkat komputer untuk kegiatan belajar di sekolah tidak semata-mata harus bergantung kepada Depkominfo melalui Program OSOL+. Dengan demikian layanan *DIY Learning Gateway* dapat segera dimanfaatkan oleh para pelajar dan guru.

4. Pengembangan Lingkungan Bisnis

Pemerintah DIY melakukan berbagai upaya untuk mendorong tumbuhnya industri teknologi informasi khususnya warnet dan Penyelenggara Jasa Internet (PJI) dalam rangka mempercepat akses masyarakat terhadap informasi, sehingga dapat mendukung program DGS dalam rangka mewujudkan visi *Jogja Cyber Province*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY tersebut adalah dikeluarkannya kebijakan penghentian penyidikan oleh Polda DIY terhadap kasus PJI yang melakukan pelanggaran administrasi. Sebelumnya, 9 (sembilan) PJI di

Yogyakarta, karena dinilai telah menyelenggarakan bisnis internet secara ilegal yang mengakibatkan iklim tidak sehat serta mengganggu peta frekuensi di Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa penyidikan dan penyitaan aset terhadap 9 PJI tersebut berdampak terhadap tutupnya lebih dari 70 warnet dan putusnya koneksi internet di 41 kantor instansi pemerintah dan sekolah, 5 perusahaan swasta, serta 23 pelanggan personal. Artinya tindakan penertiban yang dilakukan telah melumpuhkan lebih dari 50% internet di Yogyakarta.

Dampak tersebut tentu saja merugikan bagi PJI dan para user, sehingga Gubernur menganggap perlu untuk menghentikan penyidikan. Apalagi diantara kesembilan PJI tersebut, ternyata 6 diantaranya perijinannya sedang dalam proses pengurusan. Kebijakan penghentian penyidikan tersebut langsung dikeluarkan oleh Gubernur DIY melalui surat yang dikirimkan kepada Kapolda DIY. Dengan tindakan tersebut berarti Gubernur DIY lebih mengedepankan aspek pembinaan dibandingkan dengan tindakan penertiban yang dikhawatirkan akan banyak membawa kerugian bagi perkembangan industri TI lokal di DIY. Selain pembinaan terhadap para pengusaha PJI, hal yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan warung internet (warnet) yang saat ini makin menjamur dengan tarif yang cukup murah.

Data harian Kompas menunjukkan bahwa pada tahun 2006 kepemilikan komputer mencapai 6 juta unit dengan tingkat penetrasi per tahun 100.000 – 300.000 unit, sementara tingkat permintaan mencapai 500.000, sehingga kebutuhan akses internet masyarakat lebih banyak dipenuhi oleh warnet. Demikian pula dengan adanya program DGS pada bidang pendidikan yang akan membutuhkan lebih banyak koneksi internet. Selama kebutuhan perangkat komputer dan internet di sekolah-sekolah di DIY belum dapat dipenuhi 100%, maka para guru dan pelajar akan memanfaatkan warnet sebagai media akses untuk memanfaatkan layanan *DIY Learning Gateway*.

Jika saat ini di DIY terdapat kurang lebih 130 warnet yang selalu ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan fasilitas akses internet, maka di masa yang akan datang diperkirakan akan lebih banyak lagi jumlah warnet di DIY, sehingga perlu ada regulasi dari pemerintah agar keberadaan warnet dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Misalnya regulasi yang bersifat memberikan perlindungan terhadap pengguna warnet, seperti masalah pornografi. Pornografi menjadi isu penting berkaitan dengan keberadaan warnet, di mana pengguna warnet yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa dapat dengan mudah dan bebas mengakses situs-situs yang berbau pornografi di internet.

5. Pengembangan Portal DIY Learning Gateway.

DIY Learning Gateway merupakan pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DIY dalam memperluas kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya pada level pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan luar sekolah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang dapat dinikmati oleh publik tanpa batas ruang dan waktu. Fasilitas belajar tanpa batas ini dikemas dalam portal <http://www.jogjabelajar.org>.

Dengan motto "Belajar Tanpa Batas" portal ini dapat dijadikan sarana belajar online tanpa mengenal batas jarak, ruang dan waktu. Para guru atau pendidik dari berbagai tingkat pendidikan mulai SD, SMP, SMA dan SMK serta Pendidikan Non Formal (Luar Sekolah) diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya materi pembelajaran dan memperluas perannya tidak hanya di sekolahnya sendiri, tetapi ke seluruh sekolah di DIY secara *virtual*. Sedangkan peserta didik atau siswa diberi kesempatan untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai media pembelajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Masyarakat umum juga dapat memanfaatkan layanan ini secara maksimal, serta memberikan komentar ataupun saran untuk perbaikan dan penyempurnaan portal tersebut.

Dilihat dari sisi efektivitas dan efisiensi, layanan ini dinilai cukup efektif untuk mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Provinsi DIY. Dengan adanya layanan *DIY Learning Gateway* ini para guru dan siswa dari sekolah-sekolah yang ada di daerah pelosok atau yang kurikulumnya masih tertinggal, dapat mengakses materi yang sama dengan materi yang diajarkan di sekolah-sekolah unggulan melalui layanan *Virtual School*. Layanan dinilai sangat efektif dan efisien karena para guru dan siswa dapat mengakses materi tersebut tanpa harus mengunjungi sekolah yang bersangkutan, melainkan cukup melalui internet.

Portal www.jogjabelajar.org memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Selain menyajikan fasilitas publikasi berupa informasi tentang layanan *DIY Learning Gateway* dan berita seputar pendidikan di DIY, portal ini juga menyediakan fasilitas interaksi, baik secara *on-line* maupun *off-line* melalui fasilitas diskusi *on-line*, saran dan komentar, *e-mail* dan *polling*. Adapun kategori pelajaran yang disediakan di portal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Materi Pelajaran yang disediakan dalam portal *DIY Learning Gateway*

No	Tingkat Pendidikan	Materi Pelajaran
1	SD	Kelas 1; Bahasa Indonesia
		Kelas 5; Matematika
		Kelas 6; Bahasa Inggris, Matematika, Multimedia
2	SMP	Kelas 1; Agama Islam, Biologi, Fisika, Geografi, Kesenian, Matematika
		Kelas 2; Bahasa Indonesia, Biologi, Fisika, Matematika
		Kelas 3; Biologi, Fisika, Matematika, TIK
3	SMA	Kelas 1; Matematika, TIK
		Kelas 2; Biologi, Fisika
		Kelas 3; Biologi, Matematika
4	SMK	SMK; Elektronika, Boga, Kesenian, Bangunan, Perhotelan, Penerbitan, Peternakan
5	Komunitas	Komunitas; Biologi
6	Umum	Pelatihan, JVS, Panduan Guru, Teknologi InfoKom, Budaya
7	SLB	Olah raga, Latihan Membaca

Sumber : www.jogjabelajar.org

Pada dasarnya layanan *DIY Learning Gateway* merupakan fasilitas pembelajaran seperti halnya sekolah biasa di mana interaksi antara pemerintah, siswa, guru, insan pendidikan dan masyarakat umum, diperkaya dengan media pembelajaran, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan di DIY. Di dalam portal tersebut juga terintegrasi layanan *virtual school* milik 11 sekolah unggulan yang diberi label 'Sekolahku'. Layanan *virtual school* yang ada di portal *DIY Learning Gateway* selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Virtual School yang tergabung dalam portal *DIY Learning Gateway*

No	Tingkat Pendidikan	Pemilik Situs <i>Virtual School</i>
1	SD	SDN Percobaan 1, SD Muhammadiyah Condongcatur
2	SMP	SMP 1 Karangmojo, SMP 2 Depok, SMP 5 Yogyakarta
3	SMA	SMA 1 Sewon Bantul, SMA De Britto, SMA 2 Yogyakarta, SMA 8 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta

Sumber : www.jogjabelajar.org

Visi yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang adalah adanya layanan *virtual school*, yang memiliki layanan seperti halnya sekolah reguler, namun yang bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Namun disadari bahwa *Virtual school* merupakan sesuatu yang baru, yang diperkirakan baru akan benar-benar terlaksana programnya dalam beberapa tahun ke depan.

Prosedur pendaftaran untuk menjadi anggota *DIY Learning Gateway* cukup sederhana. Calon anggota cukup mengisi formulir data diri dan data sekolah yang dapat *download* di menu Pendaftaran Sekolah, selanjutnya mengirimkan kembali formulir yang telah diisi ke alamat email Administrator *DIY Learning Gateway* dengan alamat admin@jogjabelajar.org. untuk selanjutnya diproses. Calon anggota akan mendapatkan konfirmasi dari Administrator.

Formulir yang disediakan hanya dapat diisi oleh komunitas sekolah. Oleh karenanya yang dapat mendaftarkan diri untuk menjadi anggota hanyalah komunitas sekolah (guru dan siswa), sedangkan kelompok di luar komunitas sekolah mempunyai kesempatan yang terbatas untuk mengakses portal tersebut. Dengan demikian sangat kecil kesempatan bagi masyarakat di luar komunitas sekolah untuk ikut memanfaatkan portal ini. Hal ini bertentangan dengan motto "belajar tanpa batas" serta misi dari layanan portal ini, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para guru, siswa dan masyarakat umum untuk belajar tanpa batas ruang dan waktu.

Layanan portal pembelajaran www.jogjabelajar.org dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi DIY dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari 3 (tiga) divisi, yaitu Divisi Layanan, bertugas untuk mempromosikan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan *DIY Learning Gateway* bagi masyarakat pendidikan di DIY; Divisi Content, bertugas untuk mengelola *content DIY Learning Gateway* baik *learning content* maupun *non-learning content*; Divisi Teknik, bertugas

untuk memastikan bahwa semua perangkat dan infrastruktur teknis dapat bekerja dengan baik untuk mendukung semua aplikasi *DIY Learning Gateway*.

Fasilitas dan mata pelajaran yang tersedia pada masing-masing situs sekolah tersebut, menunjukkan seberapa besar komitmen sekolah, sekaligus menunjukkan seberapa jauh kemauan dan kemampuan para guru untuk memanfaatkan kemajuan TI dalam proses belajar mengajar siswanya di sekolah tersebut. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa layanan pembelajaran (baik yang ada di portal www.jogjabelajar.org maupun *virtual school* dari 11 sekolah unggulan di DIY) dirancang bukan untuk menggantikan peran sekolah reguler, melainkan untuk memperkaya media belajar bagi para guru dan siswa. Sifat pembelajaran yang berlangsung tidak lagi searah melainkan dua arah, karena ada interaksi yang aktif antara guru dengan siswa. Selain itu layanan pembelajaran melalui *virtual school* ini juga dimaksudkan untuk memperluas jangkauan layanan dari sekolah yang bersangkutan, karena materi-materi ajar yang lebih bermutu dapat diakses oleh para guru maupun para siswa dari sekolah lain yang berada di pelosok atau yang kurikulumnya tertinggal. Namun bila dikaitkan dengan ketersediaan infrastruktur *hardware*, terutama media akses internet yang belum dimiliki oleh semua sekolah, maka tujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Provinsi DIY masih sulit dicapai.

PENUTUP

Dalam rangka implementasi program *Digital Government Services* pada bidang pendidikan di Propinsi DIY, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan *e-Leadership*. Dari sisi *e-leadership*, tidak diragukan lagi bahwa pemerintah Propinsi DIY sangat komit dengan pemanfaatan TI, baik bagi peningkatan kelancaran kegiatan pemerintahan maupun bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian masih ada kendala berkaitan dengan *e-leadership* ini yaitu, masih adanya sikap beberapa pejabat yang apatis dan pesimis terhadap keberhasilan, efisiensi dan efektifitas program ini untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Propinsi DIY, dan sulitnya melakukan koordinasi antar unit organisasi (*crossfunctioned organisation*) karena pembagian tugas pokok dan fungsi organisasi masih bersifat sektoral.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan SDM dilakukan terutama bagi para guru selaku kelompok sasaran yang menjadi pengelola sekaligus pengguna layanan *DIY Learning Gateway*. Pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan dengan para instruktur dari kalangan guru yang telah menguasai TI. Kendala yang dihadapi dalam proses pelatihan adalah masih rendahnya kemampuan para guru dalam bidang TI dan kurangnya 'kejujuran' dari para guru tersebut untuk mengakui kemampuannya yang

rendah di bidang TI. Selain itu juga tidak adanya jaminan bahwa guru yang sudah selesai mengikuti pelatihan akan menerapkan ilmunya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolahnya masing-masing.

3. Pengembangan Infrastruktur. Untuk pengembangan infrastruktur dilakukan dengan pengadaan *data center*, *software* aplikasi pembelajaran serta laboratorium komputer bagi sekolah SD dan SMP yang belum memiliki laboratorium komputer. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur adalah kendala anggaran, karena dibutuhkan investasi yang sangat besar, sementara anggaran dari APBD DIY sangat terbatas.
4. Pengembangan Lingkungan Bisnis Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan industri TI di Yogyakarta dalam rangka mendukung program DGS, Pemerintah Propinsi DIY mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan penyidikan terhadap 9 (sembilan) Penyelenggara Jasa Internet di DIY yang melakukan praktik bisnis secara ilegal dan melakukan pelanggaran administrasi, seperti perijinan, kontrak kerja, uji laik operasional dan sebagainya. Pemerintah Propinsi DIY lebih mengutamakan pembinaan daripada penertiban terhadap PJI yang melakukan pelanggaran. Kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan industri TI di DIY terutama PJI adalah proses perijinan PJI yang berlapis-lapis dan kewajiban sertifikasi bagi perangkat jaringan yang digunakan. Padahal kedua ketentuan tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi PJI yang beroperasi di DIY yang kebanyakan berskala kecil dan bermodal kecil.
5. Pengembangan Portal DIY *Learning Gateway* Portal DIY *Learning Gateway* dengan alamat www.jogja-belajar.org merupakan layanan unggulan DGS pada bidang pendidikan. Pembangunan portal ini dimaksudkan sebagai media belajar dan media interaksi bagi insan pendidikan di seluruh Propinsi DIY, baik para guru, siswa (SD sampai dengan SMA) maupun masyarakat umum. Banyak fasilitas yang tersedia pada portal tersebut. Sayangnya menu-menu yang ada di portal tersebut (terutama materi ajar) sampai saat ini sebagian besar masih kosong. Seperti halnya pembangunan aplikasi-aplikasi *e-government* lainnya, pembangunan portal DIY *Learning Gateway* juga dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama karena sangat terkait erat dengan ketersediaan infrastruktur dan kemampuan SDM yang mengelolanya.

Terdapat dua hal penting yang sangat mempengaruhi efektivitas layanan DIY *Learning Gateway*, yaitu belum siapnya infrastruktur, terutama perangkat komputer di sekolah-sekolah yang tersambung dengan jaringan internet, dan belum siapnya SDM, terutama para guru, untuk mengimplementasikan layanan tersebut untuk mengisi *content* pembelajaran di portal www.jogjabelajar.org.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadjayadi, Cahyana. 2003. *Peluang dan Tantangan E-Government dalam Era Otonomi Daerah*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peluang dan Tantangan E-Government di Era Otonomi Daerah". Yogyakarta.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2005, *Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005*, Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Elektronika, BPPT, Jakarta.
- Djunaedi, Achmad. 2002. *Beberapa Pemikiran Penerapan E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "E-Government dan Workshop Linux". Fakultas MIPA UGM. Yogyakarta.
- _____. 2006. *Pembangunan Teknologi Informasi Daerah dan Kaitannya dengan Pengembangan Industri Software di Propinsi DIY*. Makalah Seminar. Yogyakarta.
- Dwijowijoto, Riant N. 2001. *Reinventing Indonesia : Menataulang Manajemen Pemerintahan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Grindle, Merilee S. dan Thomas, John W. 1991. *Public Choices and Policy Change*. The John Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Hartati, Sri. 2002. *Karakteristik E-Gov*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "E-Government dan Workshop Linux", Fakultas MIPA UGM. Yogyakarta.
- Indonesia. Departemen Perhubungan, 2001, *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*. Jakarta.
- Indonesia. Departemen Perhubungan, 2004, *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi*, Jakarta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital (Edisi II)*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Nugroho, Lukito Edi. 2003. *Kajian Penerapan E-Government di Indonesia : Aspek Teknologi*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Peluang dan Tantangan E-Government di Era Otonomi Daerah", Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Ratminto. 2007. *Draft Laporan Evaluasi Implementasi Renstrada Provinsi DIY 2004 – 2008*. Yogyakarta. Tidak Diterbitkan.
- Republik Indonesia, 2001, *Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pelayanaan Telematika di Indonesia dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*, Jakarta.

- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. Jakarta.
- Rossano, Diaz. 2006. *Penerapan e-Government dalam Pemasaran Wilayah, Studi Kasus: Pemasaran Wilayah Provinsi DIY*. Tesis MPKD UGM. Yogyakarta. Tidak Diterbitkan.
- Soendjojo, Hadwi. 2005. *E-Government dan Peningkatan Pelayanan Publik*. Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah Menuju Kepemerintahan Daerah yang Inovatif. Jakarta
- Wardiana, Wawan. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika UNIKOM. Jakarta.
- Yogyakarta, D.I., 2006, *Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.

- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. Jakarta.
- Rossano, Diaz. 2006. *Penerapan e-Government dalam Pemasaran Wilayah, Studi Kasus: Pemasaran Wilayah Provinsi DIY*. Tesis MPKD UGM. Yogyakarta. Tidak Diterbitkan.
- Soendjojo, Hadwi. 2005. *E-Government dan Peningkatan Pelayanan Publik*. Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah Menuju Kepemerintahan Daerah yang Inovatif. Jakarta
- Wardiana, Wawan. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika UNIKOM. Jakarta.
- Yogyakarta, D.I., 2006, *Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja Cyber Province Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.